

KONFLIK ANTARKAMPUNG DI WILAYAH TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Sumber, Pemicu dan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik

Oleh: Burhan Niode

Abstrak : Penelitian ini berangkat dari permasalahan yaitu: (1) apakah yang menjadi sumber persoalan yang melatari konflik antarkampung di wilayah Tomposo Baru? (2) faktor-faktor apakah yang menjadi pemicu konflik antarkampung di wilayah Tomposo baru? Dan (3) Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antarkampung di wilayah Tomposo Baru?

Studi ini akan dilaksanakan di wilayah Tomposo Baru (Kecamatan Tomposo Baru dan Kecamatan Maesaan), Kabupaten Minahasa Selatan, dan menjadikan rumah tangga sebagai responden. Adapun jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu: *community studies*, *formal/informal leaders studies*, *kajian dokumenter*, dan *kajian historis*

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sumber konflik di wilayah Tomposo Baru terbatas persoalan pemuda dan atau kelompok pemuda seperti: perilaku membuat keonaran di desa lain, pencurian, percecokan atau adu mulut, bersenggolan ketika berpapasan, kalah dalam perkelahian, dan dendam pribadi; (2) fenomena konflik di wilayah Tomposo Baru umumnya dipicu oleh tindakan-tindakan seperti: adanya ejekan dari satu pihak ke pihak tertentu ketika perpasanan, bersenggolan dengan pihak tertentu, membuat keonaran di lokasi tertentu guna memancing emosi pihak-pihak tertentu, mabuk di tempat umum; dan (3) konflik antarkampung di wilayah Tomposo Baru tidak terbatas melibatkan kelompok pemuda, tetapi pada kasus-kasus tertentu melibatkan pula mereka yang sudah tergolong bukan pemuda lagi karena sudah berumur di atas 40 tahun.

Kata kunci: konflik antarkampung, konflik sosial, kekerasan kolektif.

PENDAHULUAN

Realitas menunjukkan bahwa tidak satu negara pun di dunia yang memiliki identitas nasional yang tunggal. Negara mana pun di dunia sekarang selalu didukung oleh pluralitas penduduk baik dari segi etnik maupun dari segi agama. Indonesia misalnya, terdapat ratusan etnis dengan bahasa, budaya, dan agamanya masing-masing yang satu dengan lainnya berbeda. Perbedaan itu disamping merupakan nilai positif, juga menyimpan nilai negatif yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.

Pluralitas dan heterogenitas bangsa Indonesia itu, di satu sisi dapat dihimpun dan dikembangkan menjadi potensi bangsa. Pluralitas budaya yang ada di tanah air misalnya, merupakan kekayaan yang tiada tara dan harus disyukuri. Di sisi lain, pluralitas dan heterogenitas tersebut, mudah sekali menimbulkan gesekan antar berbagai

kelompok masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat memunculkan kekerasan komunal. Beberapa kasus belakangan ini menunjukkan bahwa pluralitas dan heterogenitas tersebut ternyata sangat rentan terhadap tindak kekerasan komunal akibat konflik sosial terutama antar etnik dan antar-agama, di samping antar kelas dan antar-golongan.

Bercermin pada berbagai kasus konflik sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Sulawesi Utara, tentunya kita perlu mewaspai berbagai bentuk konflik, khususnya konflik antarkampung, yang muncul di tingkat lokal Sulawesi Utara. Karena konflik lokal yang menyebar luas ini bukan hanya hambatan untuk pembangunan, tetapi dalam beberapa kasus bisa meningkat menjadi keresahan sosial yang lebih besar atau bahkan konflik kekerasan. Kekawatiran ini cukup beralasan karena dari data yang

ada menunjukkan bahwa wilayah Propinsi Sulawesi Utara juga tergolong daerah konflik dengan kekerasan social yang rendah karena paling tidak di daerah ini pernah terjadi 3 kekerasan komunal dengan korban jiwa berjumlah 9 orang, yang salah satunya terjadi di wilkayah Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan (Tadjoeddin, “Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi:Kasus Indonesia 1990-2010”. UNSFIR Working Paper:02/01-1).

Untuk memahami sebab-sebab munculnya konflik, lebih dulu perlu dikemukakan teorisasi tentang *Ethnonationalism* (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997:25). Para pendukung *Ethno- nationalism* terbagi dalam dua aliran. *Pertama*, para etnonasionalis yang beraliran “primordialis” mengemukakan argument bahwa banyak gerakan politik—termasuk perilaku konflik—berbasis suku yang menekankan nasionalisme etnik. Ini merupakan manifestasi dari tradisi cultural yang masih bertahan yang didasarkan pada perasaan identitas etnik primordial. Dengan demikian, motivasi utama perilaku konflik mereka adalah memelihara identitas kultural itu, sesuatu yang immaterial. *Kedua*, para teoritisi etnonasionalis yang beraliran “instrumentalis” memahami issue etnisitas itu sekadar sebagai *an exrercise in boundary maintenance*, dan berasumsi bahwa gerakan komunal merupakan respons terhadap perlakuan pilih-kasih. Jadi, mereka melakukan gerakan dengan menggunakan simbol-simbol etnik dengan tujuan memberi tanggapan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak lain; yang mungkin saja bersifat material. Penggunaan symbol-simbol etnik itu didasarkan pada alasan praktis yakni sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional.

Adapun Tilly (dalam P3PK- UGM dan Departemen Agama, 1997:26) menyatakan, bahwa tindak kekerasan merupakan hasil kalkulasi para pemimpin yang memobilisasikan sumber daya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Kekerasan dan perilaku konflik itu terjadi bukan karena ekspresi emosional masyarakat tetapi merupakan tindakan rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Pendeknya, tindak kekerasan dan perilaku konflik adalah hasil kalkulasi politik.

Pandangan-pandangan mengenai penyebab tindak kekerasan di atas, dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok teoritisi yang berpendangan bahwa tindak kekerasan dan perilaku konflik merupakan reaksi emosional terhadap gangguan dari luar. *Kedua*, kelompok pendukung instrumentalis yang berpendapat bahwa tindak kekerasan dan/atau perilaku konflik merupakan hasil dari kalkulasi strategis dan keputusan taktis (para pemimpin/elit politik).

Penelitian mengenai berbagai kelompok etnik dan komunal yang aktif dalam gerakan politik menunjukkan, bahwa mobilisasi dan strategi mereka didasarkan pada interaksi atara kedua faktor itu. “Kekecewaan akibat perlakuan pilih-kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang dapat diajukan para pemimpin gerakan” (Gurr, dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997:31). Jika kekecewaan masyarakat tidak cukup parah dan identitas kelompok tidak cukup kuat, maka para pemimpin itu tidak memiliki bahan atau sarana untuk menanggapi ancaman atau peluang yang datang dari luar kelompok. Sebaliknya, jika kekecewaan itu mendalam dan meluas, diimbangi dengan dentitas dan kepentingan

kelompok yang kuat, maka tersedialah “massa frustrasi” yang cukup; tinggal menunggu kesempatan untuk membuatnya marah besar.

Sejalan dengan pemikiran di atas, kekecewaan hanya akan menimbulkan tindak kekerasan pada aras komunitas jika dilakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi. Mobilisasi itu dapat berupa mendorong anggota kelompok atau masyarakat lainnya agar bersedia mengorbankan tenaga dan sumberdaya untuk melakukan tindakan kolektif demi kepentingan bersama.

Bagaimana dengan fenomena pemicu? Kondisi psikologis tidak secara langsung mengakibatkan timbulnya perilaku kekerasan kolektif. Hubungan itu dikualifikasi oleh adanya kejadian yang berfungsi sebagai pemicu. Pendeknya, massa yang kecewa berat itu perlu pemicu. Selanjutnya, karena pemicu itu tidak dapat diasumsikan sebagai kejadian yang sekali-jadi, tetapi mungkin terjadi sebagai rentetan peristiwa, maka untuk dapat menggugah perhatian massa, pemicu itu perlu dimobilisasi.

Hingga di sini kita dapat memahami bahwa tindakan kekerasan kolektif itu berkaitan dengan kondisi psikologis, berujud kekecewaan masyarakat yang meluas, yang diletupkan oleh kejadian pemicu. Dalam konteks ini, Gurr (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997:36), mengemukakan empat factor yang dipandangnya menentukan intensitas kekecewaan dan potensi untuk melakukan tindakan politik sebagai jalan keluarnya. *Pertama*, seberapa jauh tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibanding dengan kelompok-kelompok lain. Semakin besar perbedaan kondisi antarkelompok itu semakin kuat alasan untuk kecewa dan

semakin kokoh persepsi bahwa mereka memiliki kepetingan bersama untuk melakukan tindakan kolektif. *Kedua*, ketegasan identitas kelompok. Kekecewaan kelompok dan potensi untuk mengartikulasikan kekecewaan itu secara politik bergantung pada kekuatan (*silence*) identitas kelompok itu. Identitas kelompok biasanya sangat mencolok pada masyarakat komunal yang merasa terancam. *Ketiga*, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Kohesi kelompok terjamin jika ada jaringan komunikasi dan interaksi yang padat. Kohesi itu merosot jika kelompok itu terpecah dalam beberapa gerakan dan organisasi politik. *Keempat*, kontrol represif oleh kelompok-kelompok dominan.

Melengkapi pendapat di atas, Blau (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997:37) mengemukakan struktur pemilahan sosial (*social cleavages*) dalam masyarakat digambarkan dalam pemilahan sosial berdasarkan parameter agama, ras, suku, dan kelas sosial. Masyarakat diasumsikan dapat mengembangkan konfigurasi pemilahan sosial yang bersifat *consolidated* atau *intersected*. *Consolidated* artinya pemilahan sosial yang terjadi membuat warga masyarakat dari suku A umumnya beragama X, dan memperoleh nafkah dari mata pencaharian perdagangan. Warga dari suku B umumnya beribadat menurut agama Y dan bekerja sebagai petani; sedangkan kelompok C umumnya beragama Z dan banyak yang menduduki jabatan birokrasi-pemerintahan. Adapun konfigurasi *intersected* adalah pemilahan-sosial itu memungkinkan warga masyarakat berbagai suku memeluk agama yang berbeda serta aktif mencari nafkah dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam konfigurasi pertama, pemilahan yang eksklusif membuat hubungan antarsuku dengan mudah berubah menjadi antaragama dan antarkelas. Dalam

konfigurasi kedua, pemilahan sosial itu memungkinkan pembauran warga masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan: suku, agama, dan kelas sosial.

Berangkat dari uraian di atas, mudah dipahami bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengalami pemilahan sosial secara *consolidated* cenderung mengembangkan identitas kelompok yang kuat dan lebih mudah menciptakan kohesi kelompok yang kokoh. Dalam kelompok seperti ini, kesadaran konflik cenderung tinggi. Sebaliknya dalam masyarakat *intersected* kesadaran konflik itu lebih sulit dikembangkan, sehingga intensitas konflik cenderung rendah. Pada gilirannya, kondisi struktural itu berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat. Individu-individu dalam masyarakat dengan konfigurasi pemilahan sosial yang *consolidated* cenderung lebih mudah melakukan “subjektivikasi konflik” ketimbang warga masyarakat dengan konfigurasi yang *intersected*. Para anggota masyarakat dengan intensitas konflik tinggi cenderung lebih mudah menerjemahkan konflik yang menyangkut kondisi objektif (konflik objektif) menjadi konflik yang menyangkut pribadi (konflik subjektif). (M., Ali Imron A., “Resolusi Konflik Antaretnik dan Antaragama: Perspektif Multikultural”. Akademia, Vol. 4, No. 1, 2006, Solo, Universitas Sebelas Maret).

Penelitian ini akan mendalami konflik antarkampung yang terjadi di wilayah Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara dengan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah yang menjadi sumber persoalan yang melatari konflik antarkampung di wilayah Tompaso Baru?

- (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu konflik antarkampung di wilayah Tompaso baru?

- (3) Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antarkampung di wilayah Tompaso Baru?

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Lokasi Penelitian

Studi ini akan dilaksanakan di wilayah Tompaso Baru (Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan), Kabupaten Minahasa Selatan. Pilihan atas responden, yakni rumah tangga, dilakukan dengan tiga tahapan. *Pertama*, dipilih 4 desa yang ada di Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan secara sengaja (*purposive sampling*). Pilihan secara sengaja akan dikaitkan dengan intensitas dan frekuensi konflik yang terjadi di setiap desa. *Kedua*, untuk setiap desa terpilih, dipilih 1 jaga/dusun secara acak sederhana (*simple random*). Dengan demikian lokasi penelitian yang akan terpilih keseluruhannya berjumlah 4 jaga/dusun.

B. Jenis Studi dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk penelitian ini, sebagai berikut:

Community studies, dengan maksud memperoleh data menyangkut persepsi masyarakat terutama yang berhubungan dengan sumber konflik, pokok sengketa dan isu konflik, peran pihak-pihak lain (formal/informal leader dan aparat keamanan) dalam konflik, dan hasil dan akibat yang ditimbulkan konflik. *Community studies* dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data, yakni survey, *indepth interview* dan *focus-group discussion* (FGD). Survey dengan menggunakan kuesioner dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang

bersifat kuantitatif. Responden yang dipilih merupakan responden rumahtangga. Responden rumah tangga dipilih dengan menggunakan acak sederhana (*simple random*). Jumlah responden untuk setiap jaga/dusun ditentukan sebanyak 5 rumahtangga. Disetiap rumahtangga terpilih, akan dipilih 1 orang penghuni dewasa yang berusia 17 tahun atau sudah menikah sebagai responden. Dengan demikian secara keseluruhan akan terdapat 80 responden.

Formal/informal leaders studies, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pandangan/penilaian para formal/informal leader (bupati, camat, kades, kadus, tokoh sekolah, tokoh agama serta tokoh pemuda) berkaitan dengan sumber konflik, pokok sengketa dan issue konflik, perubahan dalam konflik seiring dengan waktu, perluasan konflik sehingga melibatkan lebih banyak pihak, wilayah, dan issue konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, hasil dan akibat yang ditimbulkan konflik, dan solusi konflik. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk *formal/informal studies*, yaitu *in-depth interview* dan FGD. Kedua teknik pengumpulan data ini akan diterapkan kepada 25 responden yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai topik ini.

Kajian dokumenter, dilakukan baik sebelum penelitian lapangan maupun dilakukan maupun ketika penelitian lapangan sementara dilakukan. Studi dokumenter ini digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan: (1) intensitas dan frekuensi konflik baik yang berskala kecil (perorangan) maupun berskala besar (kelompok/kampung)

dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2013) di Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan; (2) kebijakan atau pun himbauan yang sudah dikeluarkan oleh elemen-elemen terkait dengan konflik sosial yang terjadi di desa-desa di Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan (aparatus kepolisian, aparat kabupaten / kecamatan / desa / dusun, dan tokoh pendidikan / agama / pemuda); dan (3) kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode analisis dokumen.

Kajian historis mengenai sejarah berdirinya desa dan sejarah kedatangan kedatangan orang-orang Minahasa (sub-etnik Tolour, Totemboan, Jatun), Mongondow, Sangir, dan Bugis ke wilayah Tompaso Baru. Kegiatan ini dilakukan dengan metode analisis dokumen dan *in-depth interview* kepada pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai topik kajian yang dilakukan.

C. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) Kategorisasi data. Kategorisasi ini berdasarkan sumber-sumber data (survey dan wawancara mendalam). Selanjutnya data tersebut disusun dalam bentuk satuan-satuan yang menyangkut sumber, jenis informasi, dan lokasi penelitian. lokasi da memilah-milah menjadi kategori tertentu atas dasar pemikiran, intuisi dan pendapat berdasarkan fokus penelitian kemudian diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan informan.

- (2) Reduksi data. Proses ini dilakukan setelah data dibaca, dipelihara dan diteliti kembali dengan cara membuat abstraksi.
- (3) Penafsiran data. Reduksi ini dilakukan sepanjang penelitian, dimana setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran.
- (4) Menguji keabsahan data, ini dilakukan dengan cara membaca kembali dokumen-dokumen tertulis yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil survey dan wawancara mendalam.
- (5) Penarikan kesimpulan, diawali dengan menetapkan pola hubungan antara satu gejala dengan gejala lain, selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sekaligus menjawab tujuan penelitian.

di atas permukaan laut sehingga cocok untuk tanaman pertanian sawah dan bukan sawah (palawija, cengkih, dan hortikultura).

Tabel 1
Ketinggian Desa dari Permukaan Laut

No.	Desa	Ketinggian Desa (m)	Luas Wilayah (Ha)
I	II	III	IV
1	Liandok	800	7.500
2	Karowa	450	2.545
3	Lindangan	300	135
4	Torout	300	569
5	Pinaesaan	450	720
6	Tompaso Baru Satu	350	150
I	II	III	IV
7	Kinalawiran	560	1.970,5
8	Tompaso Baru Dua	664	275
9	Sion	700	3.431
10	Raraatean	450	919

Sumber: Diolah dari Tomposo Baru Dalam Angka 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografi

Wilayah Tomposo Baru secara geografis merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, dan terbagi dalam dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Tomposo Baru dan Kecamatan Maesaan. Batas geografis dari wilayah ini adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Wilayah ini berada pada ketinggian antara 300 meter sampai dengan 800 meter

2. Pemerintahan

Wilayah Tomposo Baru terdiri dalam dua wilayah kecamatan (Kecamatan Tomposo Baru dan Kecamatan Maesaan), secara administrative pemerintahan termasuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Kecamatan Tomposo Baru memiliki 10 desa (Raraataan, Sion, Pinaesaan, Tomposo Baru Dua, Kinalawiran, Tomposo Baru Satu, Torout, Lindangandan, Karowa, Lindok) sementara Kecamatan Maesaan memiliki 9 desa (Tumani, Lowian, Kinaweruan, Liningaan, Bojonegoro, Tambelang, Kinamang, Temboan, Kinamang Satu).

3. Penduduk dan Mata Pencarian

Pada akhir tahun 2007 tercatat penduduk Kecamatan Tomposo Baru dan

Kecamatan Maesaan sebanyak 23.537 jiwa, dimana Desa Tompasso Baru dan Desa Tumani merupakan dua desa dengan jumlah penduduk terbanyak, masing-masing berjumlah 2.123 jiwa dan 2.501 jiwa, dengan komposisi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Penghasilan utama penduduk di kedua kecamatan ini sangat tergantung kepada hasil-hasil pertanian.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

B. Sumber, pemicu dan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik

1. Sumber Konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konflik di wilayah Tompasso Baru umumnya diawali dengan:

- (1) Adanya kelompok kecil pemuda (3-5 orang) mendatangi atau secara kebetulan berada di desa tetangga dengan berbagai alasan (antara lain: mengunjungi teman dan menghadiri pesta). Ketika berada di desa tersebut, kelompok pemuda ini dengan sengaja membuat kegaduhan, sehingga memancing emosi pemuda-pemuda setempat untuk melakukan tindakan. Kelompok pemuda pendatang tersebut kemudian kembali ke desa asal dan langsung melaporkan perlakuan yang mereka alami ketika berada di desa tetangga ke kelompok mereka.
- (2) Adanya seorang pemuda yang secara tidak sengaja ketika berpapasan dengan pemuda lain atau kelompok pemuda lain saling bersenggolan atau saling mengejak. Selanjutnya terjadi percecokan atau adu mulut. Peristiwa “kecil” tersebut kemudian akan

diinformasikan kepada kelompok pemuda di desa masing-masing.

- (3) Didapati salah satu keluarga kehilangan seekor ayam aduan. Kemudian diketahui bahwa ayam yang hilang tersebut berada di desa tetangga. Pemilik ayam aduan kemudian mendatangi desa tetangga guna memintah kembali ayam tersebut. Karena ayam aduan tidak berhasil didapati kembali oleh pemiliknya dan terjadinya percecokan. Percecokan tersebut menyebar di kedua desa, dan berkembang menjadi percecokan antar kedua pemuda desa tersebut.
- (4) Adanya perkelahian antara dua orang pemuda. Perkelahian tersebut mengakibatkan salah seorang meninggal akibat ditusuk oleh senjata tajam. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian tidak dapat berbuat banyak karena pelaku pembunuhan berhasil melarikan diri ke luar daerah. Selang beberapa tahun kemudian, pelaku kembali lagi ke desa asal. Walaupun pihak kepolisian telah mengetahui keberadaan pelaku pembunuhan tersebut tetapi mereka tidak melakukan tindakan penahanan. Sehingga ada kekecewaan di pihak keluarga dan kerabat korban.
- (5) Adanya perkelahian antara dua orang pemuda yang berasal dari desa yang berbeda. Yang mersa kalah dalam perkelahian kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada teman-teman pemuda di desanya. Kelanjutnya pemuda-pemuda tersebut datang membuat keonaran di desa tetangga sehingga terjadi perkelahian dengan kelompok pemuda setempat. Perkelahian ini akan berlanjut hingga

beberapa hari ke depan. Khususnya di daerah perbatasan desa.

Dari paparan di atas jelas menunjukkan bahwa sumber konflik di wilayah Tompaso Baru sebatas persoalan pemuda dan atau kelompok pemuda seperti:

- (1) Perilaku membuat keonaran di desa lain;
- (2) Pencurian, percecokan atau adu mulut;
- (3) Bersenggolan ketika berpapasan;
- (4) Kalah dalam perkelahian, dan
- (5) Dendam pribadi.

Persoalan-persoalan yang bersifat individual tersebut akan berkembang menjadi persoalan kelompok ketika persoalan tersebut diinformasikan atau diteruskan ketingkatan desa. Hal ini berarti bahwa solidaritas sosial di desa-desa yang ada di wilayah Tompaso Baru masih kental terjalin di antara masyarakat.

Hasil penelusuran data menunjukkan bahwa penduduk yang berada di desa-desa yang tersebar di wilayah Tompaso Baru berasal wilayah-wilayah tertentu, seperti Kakas, Romboken. Sonder, Tomohon, dan Tombatu. Di samping itu ada juga yang berasal dari etnik Bolaang Mongondow, Gorontalo, Jaton, dan Bugis. Etnik-etnik tersebut umumnya membentuk suatu kelompok tertentu serta berdomisili di desa tertentu.

Bercermin pada etnisitas serta wilayah pemukiman mereka, sehingga tidaklah mengherankan bilamana persoalan pemuda akan melebar menjadi persoalan kelompok ataupun persoalan desa ketika persoalan tersebut diinformasikan atau diteruskan ke masyarakat desa lainnya.

2. Pemicu Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konflik di wilayah Tompaso Baru

umunya dipicu oleh tindakan-tindakan seperti:

- (1) Adanya ejekan dari satu pihak ke pihak tertentu ketika perpasanan;
- (2) Bersenggolan dengan pihak tertentu;
- (3) Membuat keonaran di lokasi tertentu guna memancing emosi pihak-pihak tertentu.
- (4) Mabuk di tempat umum

Tindakan-tindakan pemicu tersebut biasanya dengan sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, biasanya kelompok pemuda, agar individu atau kelompok tertentu terpancing emosinya dan melakukan tindakan yang sama sehingga berujung pada konflik terbuka. Konflik ini akan meluas menjadi konflik antar kelompok, khususnya di tempat-tempat seperti pasar dan pusat pertokoan di pusat kecamatan (Desa Tompaso Baru I).

Tabel 7
Pemicu Konflik

No.	Sumber Konflik	Frekuensi	%
I	II	III	IV
1	Mabuk	14	
2	Ugal-ugalan di pusat keramaian dan atau di jalan	3	
3	Bersenggolan ketika berpapasan	1	
4	Lainnya (balas dendam)	1	
5	Mengejek	3	

Tabel 8
Jenis-jenis Alat yang Digunakan dalam Perkelahian Antar Kampung

No.	Alat yang Digunakan dalam Konflik
I	II
1	Parang
2	Tombak
3	Samurai
4	Pana wayer
5	Senapan angin

Konflik terbuka tersebut eskalasinya akan berkembang lagi ketika terjadi di wilayah perbatasan desa. Karena sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tidak terbatas pada kelompok pemuda.

3. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kampung di wilayah Tompas Baru tidak terbatas melibatkan kelompok pemuda, tetapi pada beberapa kasus melibatkan pula mereka yang sudah tergolong bukan pemuda lagi karena sudah berumur di atas 40 tahun.

Dari hasil pendalaman didapati pula bahwa para pemuda yang sering terlibat dalam perkelahian ataupun keributan baik di desa sendiri maupun atardesa umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan taraf pendidikannya tergolong rendah atau terbatas memiliki ijazah SMP dan ataupun pernah duduk di bangku SMU tetapi tidak sampai tamat.

Tabel 9
Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik

No.	Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik	Frekuensi	%
I	II	III	IV

1	Seluruh lapisan masyarakat	6	
2	Terbatas pada kelompok pemuda	16	
3	Terbatas pada kelompok etnik tertentu	-	
4	lainnya	-	

Adapun keterlibatan mereka sudah tidak tergolong pemuda didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- (1) Solidaritas etnik;
- (2) Tanggung jawab terhadap keamanan desa;
- (3) Melindungi sanak-keluarga yang terlibat dalam konflik, dan

Melihat akan alasan keterlibatan dalam konflik antar kampung sehingga tidak mengherankan bilamana dalam kasus-kasus konflik antar kampung tertentu melibatkan *pala* (kepala jaga) dan *meweteng* (pembantu kepala jaga).

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Sumber konflik di wilayah Tompas Baru terbatas persoalan pemuda dan atau kelompok pemuda seperti: perilaku membuat keonaran di desa lain, pencurian, percecokan atau adu mulut, bersenggolan ketika berpapasan, kalah dalam perkelahian, dan dendam pribadi. Persoalan-persoalan yang bersifat individual tersebut akan berkembang menjadi persoalan kelompok ketika persoalan tersebut diinformasikan atau diteruskan ketingkatan desa.

2. Fenomena konflik di wilayah Tompaso Baru umumnya dipicu oleh tindakan-tindakan seperti: adanya ejekan dari satu pihak ke pihak tertentu ketika perpasanan, bersenggolan dengan pihak tertentu, membuat keonaran di lokasi tertentu guna memancing emosi pihak-pihak tertentu, mabuk di tempat umum. Tindakan-tindakan pemicu tersebut biasanya dengan sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, biasanya kelompok pemuda, agar individu atau kelompok tertentu yang berasal dari desa lain terpancing emosinya dan melakukan tindakan yang sama sehingga berujung pada konflik terbuka. Konflik ini akan meluas menjadi konflik antar kelompok, khususnya di tempat-tempat seperti pasar dan pusat pertokoan di pusat kecamatan (Desa Tompaso Baru I).
3. Konflik antar kampung di wilayah Tompaso Baru tidak terbatas melibatkan kelompok pemuda, tetapi pada kasus-kasus tertentu melibatkan pula mereka yang sudah tergolong bukan pemuda lagi karena sudah berumur di atas 40 tahun.

B. Saran

Dalam rangka penyelesaian konflik antarkampung di wilayah Tompaso Baru, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena sumber dan pemicu konflik dapat diidentifikasi maka penyelesaiannya didasarkan pada sumber dan pemicu konflik itu sendiri. Ini berarti bahwa kelompok pemuda, khususnya mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap, yang ada di desa-desa yang ada di wilayah Tompaso Baru harus diberikan penguatan dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan serta akses untuk memperoleh pekerjaan ataupun modal untuk melakukan aktivitas yang produktif. Bentuk penguatan yang tepat tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lokal di wilayah Tompaso Baru.
2. Dalam usaha penyelesaian konflik di wilayah Tompaso Baru, perlu dilibatkan juga para “jawara kampung”. Karena mereka termasuk individu yang disegani dan cukup berpengaruh terhadap para pemuda yang sering terlibat dalam perkelahian.
3. Aparat kepolisian dituntut untuk bertindak tegas dalam menangani ketika kasus perkelahian ataupun kasus-kasus lainnya agar apresiasi masyarakat terhadap aparat kepolisian akan lebih tinggi, masyarakat akan merasa puas, serta menghindari perasaan dendam dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
4. Di Kecamatan Maesaan perlu direalisasikan keberadaan Polsek yang berdiri sendiri. Hal ini diharapkan akan berdampak terhadap: perasaan aman dalam masyarakat serta kehadiran aparat kepolisian di TKP akan lebih cepat.

Daftar Pustaka

- Tadjoeddin, Moh. Zulfan. “Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001”. UNSFIR Working Paper: 02/01-1)).
- Oberschall, A. 1978. Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology* Vol. 4, pp. 291-315.
- P3PK-UGM. 1997. “Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu”.

- Laporan Penelitian* P3PK-UGM dengan Departemen Agama RI.
- Panggabean, Rizal. 1999. "Strategi Menyelesaikan Konflik Daerah". *Makalah Diskusi, FISIP dan P3PK-UGM*, Yogyakarta, 21 September 1999.
- Akademia, Vol. 4, No. 1, 2006, Solo, Universitas Sebelas Maret.
- Kecamatan Tompaso Baru Dalam Angka 2013
- Kecamatan Maesaan Dalam Angka 2013